



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JUNAEDI
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 104767

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 227.778.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/150 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 20.750.000
2. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 14.848.000
3. Tanah Seluas 1475 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 46.180.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 227.000.000

1. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOBIL, SUZUKI SX4 X-OVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 14.626.500

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 230.049.607



## F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----  
Rp. 699.454.107

## III. HUTANG

Rp. ----  
Rp. 699.454.107

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.